

**DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN
PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU
DALAM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :
GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM : 2025010027R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN
PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU
DALAM HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



**Oleh :
GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM : 2025010027R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN
PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU
DALAM HAK ASASI MANUSIA
NAMA : GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM : 2025010027R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan
menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 19 Juni 2026

Pembimbing I



Yati Vitria, S.H., M.H
NIPY : 10710202023210

Pembimbing II



Dinda Heidyuan Agustalia, S.H., M.H
NIPY : 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Ika Ayudyanti, S.H., M.H
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : GERARD SIMON FERDINAND POLII
2. NIM : 2025010027R
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT
DAN PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA
DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA
6. Dosen Pembimbing I : Yati Vitria, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	05-12-2025	Judul	/	/
2	05-12-2025	Rumusan Masalah	/	/
3	15-12-2025	Metode Penelitian	/	/
4	20-02-2026	Metode Penulisan	/	/
5	12-03-2026	Pembahasan Bab I	/	/
6	22-04-2026	Pembahasan Bab II	/	/
7	17-05-2026	Pembahasan Bab III	/	/
8	25-06-2026	Pembahasan Bab IV	/	/

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 25 - Juni 2026
9. Memenuhi Syarat Diujikan Pada Tanggal : 7 - Juli 2026

Pembimbing I

Yati Vitria, S.H., M.H
NIPY : 10710202023210

Pembimbing II

Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H
NIPY : 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H
NIPY : 10710202024247

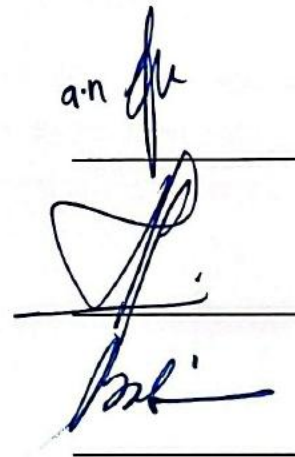
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN
PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU
DALAM HAK ASASI MANUSIA
NAMA : GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM : 2025010027R

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada Tanggal : 7 - Juli 2026.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
107102020020030
Ketua
2. Dara Puspitasari, S.H., M.H
107102020210170
Anggota
3. Abdul Basid, S.H., M.H
107102020080045
Anggota



Mengetahui Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY. 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM : 2025010027R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN
PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU
DALAM HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM. 2025010027R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM : 2025010027R
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN PKWTT DALAM
HUBUNGAN KERJA DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



GERARD SIMON FERDINAND POLII
NIM. 2025010027R

KATA PENGANTAR

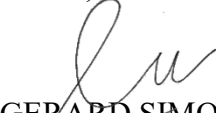
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, dan bimbingan-Nya, sehingga penulisan karya ilmiah yang berjudul “Diskriminasi Antara Pekerja PKWT dan PKWTT Dalam Hubungan Kerja Ditinjau Dalam Hak Asasi Manusia” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Karya ilmiah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemikiran serta analisis mendalam mengenai pemenuhan hak-hak pekerja agar selaras dengan prinsip keadilan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, arahan, serta dukungan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP selaku Rektor Universitas Gresik;
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik;
3. Yati Vitria, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan nasihat dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan nasihat dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan tiada henti;
6. Seluruh sahabat dan teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah banyak memberikan kenangan berharga.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

Gresik, 19 Juni 2026


GERARD SIMON FERDINAND POLII

ABSTRAK

DISKRIMINASI ANTARA PEKERJA PKWT DAN PKWTT DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA

Gerard Simon Ferdinand Polii

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pekerja dari tindakan diskriminatif secara tegas dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, implementasi perlindungan hukum bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dinilai masih bersifat deklaratif dan umum. Hal ini memperlebar celah perlakuan berbeda (*disparate treatment*) yang memicu disparitas pemenuhan hak kesejahteraan sekunder pekerja kontrak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mengevaluasi sinkronisasi normatif perlindungan korban diskriminasi dalam hubungan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan nasional saat ini masih lemah karena belum mengakomodasi kodifikasi perlindungan konkret, sanksi tegas bagi pengusaha yang diskriminatif, serta doktrin pergeseran beban pembuktian (*shifting burden of proof*) di Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, terdapat kesenjangan interpretasi hukum di mana hukum nasional cenderung terpaku pada diskriminasi langsung, berbeda dengan instrumen HAM internasional seperti Konvensi ILO No. 111 dan ICESCR yang mencakup larangan diskriminasi tidak langsung berbasis status ikatan kerja demi mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Diskriminasi Kerja; PKWT dan PKWTT; Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

AUTHORITY TO ADJUDGE REQUEST CASES (VOLUNTARY) IN CIVIL PROCEDURE LAW

Gerard Simon Ferdinand Polii

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University

Human Rights (HAM) protection for workers against discriminatory actions is explicitly guaranteed under Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 6 of Law Number 13 of 2003 concerning Labour. However, following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, the implementation of legal protection for workers under Fixed-Term Employment Contracts (PKWT) and Indefinite-Term Employment Contracts (PKWTT) is considered merely declarative and general. This situation widens the gap of disparate treatment, triggering disparities in fulfilling secondary welfare rights for contract workers.

This study employs a normative legal research method utilizing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The sources of legal materials comprise primary and secondary legal materials collected through literature reviews, which are subsequently processed and analyzed qualitatively to evaluate the normative synchronization of protecting victims of discrimination within employment relations.

The results indicate that national labour regulations remain weak due to the absence of concrete codifications of protection, strict sanctions for discriminatory employers, and the adoption of the shifting burden of proof doctrine in the Industrial Relations Court. Furthermore, there is a legal interpretation gap where national law tends to focus solely on direct discrimination, contrasting with international human rights instruments such as ILO Convention No. 111 and the ICESCR which encompass prohibitions on indirect discrimination based on employment status to achieve substantive justice.

Keywords: *Labour Discrimination; PKWT and PKWTT; Human Rights.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Landasan Konseptual	8
1.5.1.1 Pengertian Pekerja dan Pengusaha	8
1.5.1.2 Pengertian PKWT, PKWTT, dan Hubungan Kerja	10
1.5.1.3 Hakikat Hak Asasi Manusia	12
1.5.1.4 Diskriminasi Dalam Hubungan Kerja	15
1.5.2 Landasan Yuridis	19
1.5.2.1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	19
1.5.2.2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia	21
1.5.2.3 Undang-Undang Ketenagakerjaan	23
1.5.2.4 Instrumen HAM Internasional	25
1.5.3 Landasan Teori	27
1.5.3.1 Teori Hak Asasi Manusia	27
1.5.3.2 Teori Kesetaraan	28
1.5.3.3 Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Hubungan Kerja	30
1.6 Penelitian Terdahulu	31
1.7 Metode Penelitian	33
1.7.1 Jenis Penelitian	33
1.7.2 Metode Pendekatan	33
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	35

1.7.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	38
1.8	Sistematika Penulisan	39
BAB II	PENGATURAN HUKUM KORBAN DISKRIMINASI DI LINGKUP HUBUNGAN KERJA PKWT DAN PKWTT DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HAK ASASI MANUSIA	41
2.1	Negara Hukum dan Perlindungan HAM	41
2.2	Prinsip HAM dalam Hubungan Kerja PKWT dan PKWTT	44
2.3	Pengaturan Perlindungan Hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan	49
2.4	Diskriminasi Dalam Hubungan Kerja Sebagai Pelanggaran HAM	52
BAB III	KONSEP DISKRIMINASI DALAM HUBUNGAN KERJA MENURUT HUKUM NASIONAL DAN INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL	56
3.1	Hubungan Kerja Sebagai Perlindungan HAM	56
3.2	Konsep Diskriminasi Dalam Instrumen HAM Internasional	60
3.3	Perbandingan Konsep Diskriminasi Dalam HAM secara Nasional dan Internasional	63
3.4	Arah Penguatan Konsep Diskriminasi dalam Hukum Nasional	66
BAB IV	PENUTUP	71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	72
DAFTAR BACAAN		